

BAB III

AGREEMENT ON COMFORT WOMAN ANTARA KOREA SELATAN-JEPANG

Secara umum dalam bab III ini akan menjelaskan tentang bagaimana perjanjian tentang isu *jugun ianfu* yang telah dicapai oleh Korea Selatan-Jepang pada tahun 2015. Hal ini mencakup bagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara sebelum tercapainya perjanjian tersebut, baik pada level pemimpin negara maupun representatifnya. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan kedua negara, serta pernyataan resmi dari kedua pemerintah setelah perjanjian tersebut berhasil dicapai pada tahun 2015.

A. Proses Negosiasi Sebelum Adanya Kesepakatan Terkait dengan Isu *Jugun Ianfu* Tahun 2015

1. Pertemuan Tingkat Pemimpin Negara

Setelah selama kurang lebih 25 tahun menjadi perdebatan dan menjadi salah satu pembahasan penting dalam diskusi kedua negara, akhirnya Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menyelesaikan isu *jugun ianfu* di tahun 2015. Walaupun hubungan kedua negara sempat mengalami titik terendah, hal ini terkait dengan masalah sejarah terutama berkaitan dengan rencana pemerintah Abe yang memutuskan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang digunakan dalam penyusunan *Kono Statement* tahun 1993 serta perselisihan terkait batas wilayah antar kedua negara. Pemerintah Korea Selatan dan Jepang sempat menggelar pertemuan untuk pertama kalinya sejak kedua pemimpin negara tersebut mulai menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Pertemuan kedua negara tersebut dilakukan bersama dengan pihak Amerika Serikat di sela-sela Konferensi Keamanan Nuklir di Den Haag Belanda (BBCIndonesia, 2014). Pada pertemuan tersebut kedua

negara menyetujui untuk menggelar diskusi tingkat direktur jenderal sebagai upaya dalam penyelesaian isu *jugun ianfu*.

Pada tahun berikutnya hubungan kedua negara diperkirakan akan lebih baik karena kedua negara lebih bisa saling berkompromi terhadap permasalahan terkait sejarah yang menjadi perdebatan antara kedua negara. Hubungan yang semakin membaik antara pihak Korea Selatan dan Jepang mulai ditunjukkan melalui pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir pada bulan Juni 2015 di sela-sela kunjungannya ke Jepang dalam rangka menghadiri upacara peringatan 50 tahun penandatanganan perjanjian normalisasi hubungan antara kedua negara yang dilakukan pada tahun 1965 di Tokyo. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu yang sangat sensitif dan menjadi salah satu sumber ketegangan hubungan bilateral kedua negara yakni berkaitan dengan *jugun ianfu* atau *comfort woman* dalam rangka mencari solusi terbaik terkait dengan masalah ini (Fitriani, 2015).

Pada bulan oktober 2015 Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyatakan bahwa dirinya telah membuka jalan bagi diadakannya pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Menurutnya kedua negara harus menekankan pada pentingnya kemajuan terkait dengan isu *jugun ianfu*. Pertemuan bilateral kedua negara dianggap menjadi hal yang sangat penting dan diharapkan bisa membuka jalan bagi kedua negara untuk bergerak maju menuju hubungan yang berorientasi pada masa depan (Maler, 2015).

Pada tanggal 2 November 2015, dimulai sekitar pukul 10.00 WIB kira-kira satu jam 45 menit Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Presiden Korea Selatan Park

Geun-hye saat dirinya berkunjung ke Seoul untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral antara pemerintah Korea Selatan, China, dan Jepang. Pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral formal yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua pemimpin negara sejak keduanya mulai resmi menjabat pada tahun 2012 dan 2013 (Thepeninsulaqatar, 2015). Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk segera menyelesaikan permasalahan mengenai *jugun ianfu* atau para perempuan yang dipaksa bekerja di rumah bordil milik militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II. Perdana Menteri Abe juga mengumumkan kesepakatan tersebut setelah kedua pemimpin negara mengadakan perundingan formal pertama mereka sejak menjabat, ketika keduanya berusaha untuk bangkit dari isu-isu sejarah pada masa perang yang telah menghantui hubungan kedua negara. Pertemuan tersebut juga merupakan keberhasilan diplomatik bagi Perdana Menteri Abe yang telah melakukan pembicaraan dua arah dengan Presiden Park di tengah tekanan oleh Amerika Serikat untuk Korea Selatan dan Jepang agar segera memperbaiki hubungan dalam rangka menghadapi China yang semakin tegas dan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi. Tokyo dan Seoul juga telah berusaha untuk menemukan kesamaan interpretasi atas kolonialisasi Jepang terhadap Korea Selatan terutama mengenai isu wanita penghibur atau *ianfu* yang sebagian besar adalah para gadis dan wanita yang berasal dari Korea. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye juga mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Asahi Shimbun bahwa mengatasi perselisihan antara kedua negara terkait isu *jugun ianfu* merupakan hal penting bagi terciptanya hubungan yang lebih baik dengan Jepang karena para pemimpin Jepang telah berulang kali gagal untuk menebus kekejaman pada masa perang. Oleh karena itulah diperlukan penyelesaian dengan cara yang dapat

diterima oleh para korban dan warga Korea Selatan lainnya (Reuters, Bloomberg, 2015).

Secara lebih terperinci gambaran Pertemuan Tingkat Tinggi yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara tersebut diawali dengan pertemuan kelompok kecil pada awal Pertemuan Tingkat Tinggi yang diadakan kurang lebih satu jam. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang lebih diperluas dan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan pertemuan kelompok kecil yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pertemuan ini, selain melibatkan kedua pemimpin negara juga dihadiri oleh Yun Byung-se selaku Menteri Luar Negeri Korea Selatan, dan Kim Kyou-hyun selaku Sekretaris Senior Presiden untuk Urusan Luar Negeri serta para petugas Keamanan dari pihak Korea Selatan. Fumio Kishida selaku Menteri Luar Negeri Jepang, Koichi Hagiuda selaku Wakil Sekretaris Kabinet dan Shotaro Yachi selaku Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional (NSS) dari pihak Jepang dan Lee Byung-kee selaku Kepala Staf Presiden Korea Selatan. Kedua pemimpin negara tersebut mengadakan diskusi terbuka mengenai berbagai isu antara Korea Selatan dan Jepang. Perdana Menteri Abe menjelaskan bagaimana posisi Jepang mengenai isu-isu tersebut dan meminta pihak Korea Selatan untuk bersama membahas secara lebih jauh.
2. Berdasarkan pengakuan bahwa isu *jugun ianfu* telah berdampak pada perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang, kedua pemimpin tersebut mengakui pentingnya bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang berorientasi pada masa depan agar tidak membiarkan generasi masa depan terus terganggu oleh masalah ini.

Mengenai masalah ini, Direktur Jenderal dan konsultasi tingkat lainnya telah melangsungkan diskusi dengan kuat. Kedua pemimpin sepakat untuk menginstruksikan agar mereka melanjutkan dan mempercepat konsultasi untuk menyimpulkan permasalahan ini sesegera mungkin, mengingat fakta bahwa tahun ini merupakan tahun penting bagi peringatan 50 tahun normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.

Sedangkan beberapa hal penting terkait dengan pertemuan di sesi kedua diantaranya adalah :

1. Kedua pemimpin negara tersebut saling menghargai fakta bahwa hubungan bilateral antara kedua negara secara bertahap semakin mendalam sebagai upaya untuk menjalin komunikasi antara Jepang dan Korea Selatan, juga pandangan bersama untuk memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang di berbagai bidang termasuk keamanan, pertukaran warga negara, dan kerjasama ekonomi. Selain itu, Perdana Menteri Abe mengemukakan situasi saat ini di Laut Cina Selatan.
2. Diskusi yang mendalam terjadi terkait dengan masalah Korea Utara dan kedua pemimpin negara mengkonfirmasi bahwa Korea Selatan-Jepang, dan Korea selatan-Amerika Serikat-Jepang, keduanya akan bekerja sama secara lebih kuat di bidang keamanan untuk mengambil tindakan terhadap Korea Utara terkait dengan denuklirisasi. Selanjutnya, mereka juga berbagi pandangan untuk saling bekerja sama dalam masalah kemanusiaan, termasuk berkaitan dengan masalah penculikan.
3. Kedua pemimpin negara juga membahas berbagai isu terkait dengan masalah ekonomi, seperti memperdalam hubungan ekonomi bilateral, serta

menekankan pentingnya Perjanjian Perdagangan Bebas antara Korea Selatan-China-Jepang (FTA) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), serta signifikansi Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) (Ministry of Foreign affairs of Japan, 2015).

Satu hari sebelum diadakannya pertemuan antara Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral antara pemerintah Jepang, China dan Korea Selatan, kedua negara juga telah menggelar pertemuan yang diwakilkan oleh Yun Byung-se dari pihak Korea Selatan dan Fumio Kishida dari pihak Jepang.

Setelah adanya pertemuan antara kedua negara, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan telah menginstruksikan Menteri Luar Negerinya untuk secara lebih lanjut membahas mengenai permasalahan *jugun ianfu* bersama dengan pihak Korea Selatan selama kunjungannya ke Seoul pada Desember 2015. Isu ini telah menjadi penghambat bagi hubungan yang terjalin antara kedua negara selama beberapa dekade. Korea Selatan sebelumnya telah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang melalui permintaan maaf yang disampaikan belumlah cukup untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Korea Selatan bahkan mengkritik keengganan pemerintah Jepang untuk beritikad baik dan menebus kesalahan masa lalu selama perang dengan tidak segera mengambil tindakan dan solusi terbaik terkait dengan permasalahan ini. Namun hubungan kedua negara dianggap semakin membaik ketika baru-baru ini kedua negara sama-sama melunak dan akhirnya sepakat untuk mempercepat diskusi mengenai permasalahan *jugun ianfu* (BBCNews, 2015)

2. Diskusi Tertutup Level Direktur Jenderal Korea Selatan-Jepang

Selain diskusi pada level pemimpin negara, kedua belah pihak juga mengadakan pembicaraan tertutup pada level direktur jenderal yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Direktur Jenderal dari Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Asia dan Biro Urusan Kelautan. Diskusi tertutup tersebut setidaknya mencapai 12 kali pertemuan yang mulai dilakukan sejak 16 April 2014 sampai satu hari sebelum pengumuman perjanjian tersebut. Diskusi level jendral ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara pada KTT Keamanan Nuklir di Den Haag bersama dengan pihak Amerika Serikat pada maret 2014.

Selama periode awal dilakukannya konsultasi level Direktur Jenderal antara kedua negara, kedua belah pihak tetap pada perspektifnya masing-masing terkait isu ini dan mengakibatkan pertemuan ini kurang menunjukkan kemajuan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menggelar Konsultasi Tingkat Tinggi antara perwakilan kedua negara yang bisa menjalin komunikasi langsung dengan Kepala Negara masing-masing.

Pada akhir tahun 2014 pihak Korea Selatan memutuskan untuk menggelar Konsultasi Tingkat Tinggi antara kedua negara, di mana Korea Selatan mengutus kepala staf kepresidenannya yang juga merupakan mantan Direktur Badan Intelejen Negara Lee Byung-kee sebagai negosiator dan Jepang mengutus Sekretaris Jenderal Keamanan Nasionalnya sebagai negosiator. Konsultasi Tingkat Tinggi yang pertama berhasil dilakukan pada bulan februari 2015, dari jumlah total sebanyak 8 kali pertemuan sebelum tercapainya perjanjian tersebut pada 28 Desember

2015. Selebihnya, negosiasi dilakukan melalui jaringan telepon antara kedua negosiator.

Tabel 3.1 Tanggal dan tempat diadakannya diskusi tertutup tingkat Direktur Jenderal Korea Selatan-Jepang terkait dengan isu *Jugun Ianfu*

Tanggal	Sesi	Tempat	Tanggal	Sesi	Tempat
16 April 2014	1	Seoul	16 Maret 2015	7	Seoul
15 Mei 2014	2	Tokyo	11 Juni 2015	8	Tokyo
23 Juli 2014	3	Seoul	18 September 2015	9	Tokyo
19 September 2014	4	Tokyo	11 November 2015	10	Seoul
27 November 2014	5	Seoul	15 Desember 2015	11	Tokyo
19 Januari 2015	6	Tokyo	27 Desember 2015	12	Seoul

Sumber : *Report on the review of the Korea-Japan Agreement of December 28, 2015 on the Issue of "Comfort Woman" Victims*

Pihak Korea Selatan menyampaikan tuntutan pada negosiasi level Direktur Jendral ke 6 yang dilaksanakan pada Januari 2015 sebelum konsultasi Tingkat Tinggi yang pertama berhasil dilakukan. Tuntutan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Jepang harus mengakui tanggung jawabnya tanpa kualifikasi apapun, permintaan maaf secara resmi yang lebih ditingkatkan dibandingkan dengan

sebelumnya serta memberikan jaminan bahwa permintaan maaf tersebut tidak dapat di tarik kembali, serta implementasi atas tanggung jawab tersebut juga harus menggunakan uang dari anggaran pemerintah Jepang.

Pada Konsultasi Tingkat Tinggi pertama, Jepang menyampaikan tanggapan atas permintaan yang disampaikan oleh pihak Korea Selatan, termasuk konfirmasi atas perjanjian akhir dan tidak dapat diubah lagi, resolusi akhir terkait dengan isu *jugun ianfu* dan patung yang terdapat di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, serta tindakan untuk saling menahan diri dalam mengkritik satu sama lain dalam forum Internasional. Kedua negara akhirnya berhasil menyelesaikan isu yang sudah tertunda beberapa kali ini dan mencapai perjanjian sementara pada Konsultasi Tingkat Tinggi keempat yang dilaksanakan pada 11 April 2015. Sekitar 2 bulan setelah sesi pertama dari Konsultasi Tingkat Tinggi dilakukan. Dalam perjanjian sementara ini tidak hanya terdapat 3 poin utama termasuk tanggung jawab, permintaan maaf, dan juga bantuan keuangan dari pemerintah Jepang tetapi juga poin untuk mencapai resolusi akhir dan tidak dapat diubah lagi, patung *jugun ianfu*, dan menahan diri untuk saling membenci dan memberikan kritik pada forum Internasional.

Dalam proses menunggu konfirmasi dan persetujuan langsung dari kepala negara masing-masing atas perjanjian sementara yang dicapai pada april 2015, pihak Jepang tetap berharap untuk bisa menambahkan elemen yang kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh pemerintah Korea Selatan. Hal ini berkaitan dengan penghapusan patung *jugun ianfu* yang juga terletak di beberapa kota lain selain di Seoul.

Sementara itu, ketegangan antara kedua pemerintah kembali meningkat pada bulan juni 2015. Hal itu terkait dengan isu prasasti dari fasilitas industri

Jepang modern yang juga disebut dengan *BattleShip Island* masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO. Permasalahan ini kemudian berdampak pada konsultasi terkait isu *jugun ianfu* yang tidak menunjukkan kemajuan apapun.

Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan China yang dilaksanakan di Seoul pada 1 November 2015, memberikan kesempatan kepada kedua negara untuk memulai kembali konsultasi yang tertunda pada saat Konsultasi Tingkat Tinggi. Pada tanggal 2 November kedua negara melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi bilateral dan sepakat untuk menyelesaikan isu *jugun ianfu* sesegera mungkin. Mempertimbangkan bahwa tahun ini merupakan perayaan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik antara Korea Selatan-Jepang. Presiden Park Geun-hye menunjukkan kebulatan tekadnya untuk segera menyelesaikan isu *jugun ianfu* pada tahun ini, dan kemudian perjanjian tersebut berhasil dimatangkan pada pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi ke 8 yang dilaksanakan pada 23 Desember 2015.

Tidak lama setelah perjanjian sementara berhasil dicapai, Kementerian Luar Negeri meneruskan tentang pandangannya ke Kantor Kepresidenan terkait kata tidak dapat diubah lagi dalam perjanjian tersebut. Pemerintah juga diharapkan untuk bertemu dengan pihak oposisi serta penghapusan terhadap kata tersebut dalam perjanjian sementara ini. Namun, kantor Kepresidenan tidak menerima pendapat dari Kementerian Luar Negeri. Pada akhirnya Menteri Luar Negeri Korea Selatan-Jepang bertemu di Seoul pada 28 Desember 2015 untuk mengkonfirmasi isi dalam perjanjian dan mengumumkan perjanjian tersebut melalui konferensi pers bersama. Pada hari yang sama, kedua pemimpin negara juga mengkonfirmasi isi dari perjanjian tersebut melalui telepon. Setelah konfirmasi

yang dilakukan, Presiden Park kemudian mengumumkan perjanjian tersebut kepublik.

Sebagai instansi pemerintah yang juga menangani isu terkait *jugun ianfu* Kementerian Luar Negeri tidak dapat berpartisipasi pada Konsultasi Tingkat Tinggi yang dilakukan pada level individu. Walaupun kementerian tetap mendapatkan rincian dan juga hasil dari konsultasi melalui Kantor Kepresidenan serta tetap melakukan konsultasi dengan kantor Presiden. Kunci utama dalam pengambilan kebijakan terkait isu *jugun ianfu* hanya terletak pada kantor kepresidenan (mofa.go.kr, 2017)

B. Kesepakatan Dalam *Agreement on Comfort Woman* Antara Korea Selatan-Jepang Tahun 2015

Kesepakatan penting antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015 terkait dengan isu *jugun ianfu* merupakan itikad baik yang ditunjukkan oleh kedua negara untuk saling berkompromi terkait dengan isu sejarah yang telah lama menjadi perdebatan kedua negara tersebut. Meskipun kesepakatan ini kurang mendapat sambutan baik oleh banyak orang di Korea Selatan, termasuk LSM yang berpengaruh dalam isu *jugun ianfu*, kesepakatan tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh kedua negara (Alexander, 2017, hal. 9).

Pada tanggal 28 Desember 2015 pemerintah Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menandatangani sebuah perjanjian terkait dengan isu *jugun ianfu*. Perjanjian ini diharapkan menjadi solusi akhir bagi permasalahan *jugun ianfu* Jepang dan mengakhiri satu dekade isu bilateral antara kedua negara. Secara umum perjanjian tersebut berisi tentang permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang kepada para korban dan juga bersedia untuk berkontribusi sebanyak 1 miliar yen atau kurang lebih sebanyak \$8.9 juta untuk membangun sebuah yayasan

di bawah pemerintah Korea Selatan bagi para korban yang masih hidup (Panda, 2017). Kesepakatan terkait isu ini bukan hanya berkaitan dengan masalah diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang, namun juga menjadi masalah domestik yang sensitif di Korea Selatan terutama bagi pemerintah untuk bisa menerapkan kesepakatan tersebut. Tugas utama Presiden Park saat ini bukan untuk melawan oposisi yang menentang kesepakatan ini, melainkan mengintegrasikannya ke dalam proses implementasi bersama. Pemerintahan Presiden Park perlu membujuk para *jugun ianfu* dan kerabat *jugun ianfu* yang telah meninggal, kelompok masyarakat sipil, dan partai-partai oposisi untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kesepakatan ini (Lee, 2016).

Kesepakatan terkait *jugun ianfu* pada tahun 2015 telah banyak disuarakan oleh banyak ahli sebagai salah satu contoh keberhasilan diplomasi, namun keberhasilannya ini masih sangat bergantung pada bagaimana Presiden Park dapat mendamaikan ketidaksepakatan dalam masyarakat Korea dan menerapkan kesepakatan tersebut secara efektif. Sehingga kesepakatan ini kemudian bisa menjadi titik awal untuk mendamaikan warisan sejarah dalam hubungan Korea Selatan-Jepang dan memetakan jalan menuju hubungan bilateral yang berorientasi pada masa depan.

Setelah adanya kesepakatan ini, melalui Menteri Luar Negerinya Fumio Kishida, pemerintah Jepang menyatakan secara resmi menyetujui dan mengakui bahwa kekejaman telah terjadi dengan melibatkan tentara kekaisaran Jepang dalam isu ini. Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengungkapkan permintaan maaf dan juga penyesalan yang sangat mendalam kepada semua perempuan yang mengalami tekanan dan juga pengalaman pahit selama menjadi *jugun ianfu* Jepang. Sebagai imbalan, Menteri Luar

Negeri Korea Selatan Yun Byung-se juga berjanji untuk meletakkan seluruh masalah dan menemukan solusi terbaik dan damai antara kedua belah pihak terkait dengan permintaan pemerintah Jepang untuk menghapus atau menghilangkan patung *jugun ianfu* di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan.

Selain mengharapkan penyelesaian atas isu *jugun ianfu* yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu hubungan baik antara kedua negara, kesepakatan ini juga diharapkan mampu menjadi jalan bagi normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang sempat bersitegang serta hubungan yang lebih baik lagi bagi kerjasama trilateral antara AS-Korea Selatan-Jepang. Secara lebih terperinci, beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari kedua negara diantaranya adalah :

1. Kesepakatan tersebut mencakup pernyataan pertanggungjawaban dari Pemerintah Jepang atas penderitaan yang dialami oleh para *jugun ianfu*, serta permintaan maaf dari Perdana Menteri Shinzo Abe dan pemberian dana kompensasi sebesar satu miliar yen atau setara dengan \$8.9 juta.
2. Kelompok LSM di Korea Selatan mungkin tidak akan sepenuhnya puas, namun kesepakatan tersebut berjalan lebih jauh daripada yang diperkirakan, Jepang tetap akan mengakui hal ini sebagai tanggung jawab dari pemerintah.
3. Tanggung jawab yang berat berada di tangan pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi komitmennya dalam perjanjian ini dan menjadikan hal ini sebagai penyelesaian akhir dari masalah ini, yang berarti kondisi domestik yang kompleks membuat pemerintah harus bisa mengelola reaksi dari LSM dan kelompok oposisi politik.
4. Pada tingkat politik, perjanjian ini diharapkan mampu membuka jalan bagi normalisasi hubungan

politik antara kedua negara dan juga sebagai salah satu syarat penyempurnaan kerja sama trilateral dengan pihak Amerika Serikat terkait dengan masalah keamanan regional. Kerjasama ini juga mencakup kesepakatan untuk berbagi informasi militer di antara sekutu-sekutu (Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2015).

C. Pernyataan Resmi Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang

Seperti dikutip dalam *Washington Coalitin for comfort woman issues*, menteri luar negeri kedua negara menyatakan pernyataannya masing-masing atas perjanjian ini. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan beberapa hal terkait dengan perjanjian *jugun ianfu* antara kedua negara.

Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Korea (ROK) telah secara intensif membahas masalah tersebut dalam pertemuan bilateral termasuk konsultasi dengan Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Perdana Menteri Kishida atas nama Pemerintah Jepang, menyatakan hal berikut :

1. Isu *jugun ianfu* dan keterlibatan otoritas militer Jepang pada saat itu adalah penghinaan yang teramat besar terhadap kehormatan dan juga martabat sejumlah besar perempuan, pemerintah Jepang sangat menyadari tanggung jawab dalam perspektif ini. Sebagai Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan yang teramat dalam dan tulus kepada semua wanita yang mengalami pengalaman buruk dan rasa sakit yang tidak bisa terukur, baik luka fisik maupun luka psikologis yang tidak akan bisa disembuhkan selama menjadi seorang *jugun ianfu* Jepang.
2. Pemerintah Jepang menyampaikan permintaan mendalam secara tulus terkait dengan isu ini.

Dengan adanya pengalaman tersebut, Pemerintah Jepang saat ini akan mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk menyembuhkan luka fisik maupun psikologis yang diderita oleh semua korban *jugun ianfu* yang masih hidup melalui anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Secara lebih spesifik, pemerintah Jepang akan berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan dan akan mendirikan sebuah yayasan yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan bagi para perempuan mantan *jugun ianfu*. Dana berupa sumbangan yang diberikan oleh pemerintah Jepang juga merupakan dana kontribusi sekali melalui anggaran dan proyek pemerintah untuk memulihkan kembali kehormatan dan martabat serta penyembuhan luka psikologis dari semua perempuan korban *jugun ianfu* Jepang.

3. Sementara menyatakan hal tersebut di atas, Pemerintah Jepang menegaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan melalui kesepakatan *finally and irreversibly* dan kesepakatan ini tidak dapat diubah ataupun dibatalkan dengan alasan bahwa Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah yang ditentukan. Sebagai tambahan, bersama dengan Pemerintah Korea Selatan (ROK), Pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak menuduh atau mengkritik satu sama lain mengenai masalah ini di dalam lingkungan internasional termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Korea Selatan dan Jepang juga telah secara intens mendiskusikan isu *jugun ianfu* antara Korea Selatan dan Jepang dalam pertemuan bilateral kedua negara yang juga melibatkan *Director-General consultations*. Berdasarkan hasil diskusi dalam

pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se menyatakan beberapa pernyataan berikut diantaranya :

1. Pemerintah Korea Selatan menghargai pengumuman dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Korea Selatan juga telah mengkonfirmasi hal tersebut, bersamaan dengan adanya pengumuman dari pemerintah Jepang akhirnya masalah terkait isu *jugun ianfu* telah dapat diselesaikan dan tidak dapat dibatalkan dengan adanya pengumuman ini secara resmi. Pemerintah Jepang juga akan terus menerapkan langkah-langkah yang telah ditentukan dan pemerintah Korea Selatan akan secara penuh bekerja sama dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut.
2. Pemerintah Korea Selatan mengakui fakta bahwa Pemerintah Jepang mengkhawatirkan pembangunan patung *jugun ianfu* yang dibangun di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Dengan mencoba melihat dari sudut pandang pemerintah Jepang, hal ini untuk mencegah adanya gangguan bagi perdamaian antara kedua negara maupun menurunkan martabat dari pemerintah Jepang sendiri. Pemerintah Korea Selatan juga akan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling tepat melalui pengambilan keputusan dengan berkonsultasi dan melibatkan organisasi yang berkaitan untuk mencapai solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini.
3. Pemerintah Korea Selatan bersama dengan Pemerintah Jepang akan bersama-sama menahan diri untuk tidak akan menuduh atau pun mengkritik satu sama lain mengenai masalah ini di lingkungan internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan alasan bahwa Pemerintah

Jepang akan terus menerapkan langkah-langkah yang telah diumumkannya (Ministry of Foreign affairs of Japan, 2015).

D. Konfirmasi dan Pernyataan Resmi Oleh Pemimpin Kedua Negara

Setelah pengumuman resmi telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Presiden Park Geun-hye mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. Di mana Kedua pemimpin negara tersebut mengkonfirmasi dan menghargai fakta bahwa pemerintah mereka telah mencapai kesepakatan mengenai isu *jugun ianfu*, setelah melakukan konsultasi yang diikuti dengan Pertemuan Tingkat Tinggi antara pemerintah Jepang dan Korea Selatan yang diadakan di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi antara Jepang-China-Korea Selatan pada bulan November.

Selain itu dalam pembicaraan yang berlangsung kurang lebih selama 15 menit tersebut kedua negara secara resmi menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah :

1. Sebagai Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalannya yang paling dalam dan tulus kepada semua wanita yang mengalami pengalaman buruk dan menyakitkan serta menderita luka fisik dan psikologis yang tidak dapat disembuhkan ketika mereka bekerja sebagai *jugun ianfu* Jepang. Sementara itu Abe juga menyatakan bahwa Jepang terus memegang posisi bahwa isu-isu yang berkaitan dengan properti dan klaim antara Jepang dan Korea Selatan termasuk isu terkait *jugun ianfu* akhirnya telah diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah Jepang dan Korea

Selatan melalui perjanjian *Japan-ROK Claims Settlement and Economic Cooperation Agreement* pada tahun 1965. Perdana Menteri Abe juga menyambut baik fakta bahwa isu *jugun ianfu* telah diselesaikan secara *finally and irreversibly* melalui kesepakatan ini.

2. Presiden Park juga menghargai fakta bahwa kesepakatan akhir mengenai isu wanita penghibur atau *jugun ianfu* telah berhasil dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara dan menyatakan bahwa dirinya menantikan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam membangun hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang baru.
3. Kedua pemimpin tersebut menegaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab sebagai pemimpin untuk melaksanakan kesepakatan ini dan bahwa mereka juga akan menghadapi berbagai isu sebagai akibat adanya kesepakatan ini. Kedua pemimpin tersebut juga menegaskan pentingnya kedua negara untuk bergerak maju dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dengan memperkuat kerja sama kedua negara di berbagai bidang seperti keamanan, pertukaran warga negara, serta bidang ekonomi (The Government of Japan, 2015).